

BAB III

PROSES PEMBENTUKAN NIL BASIN COOPERATION FRAMEWORK AGREEMENT (CFA)

Dalam bab ini, menjelaskan tentang perjanjian-perjanjian yang pernah dibentuk dalam pengelolaan Sungai Nil sebelum dibentuk sebuah kerangka sementara untuk mendukung pertukaran dialog antara negara riparian (negara sekitar Sungai Nil), yang disebut dengan Nil Basin Initiative (NBI). Setelah dijelaskan perjanjian-perjanjian sebelum NBI, bab ini juga akan menjelaskan bagaimana proses terbentuknya NBI itu sendiri. Setelah NBI terbentuk, dibentuklah sebuah kerangka permanen, yaitu *Cooperative Framework Agreement* (CFA) dalam upaya pengelolaan Sungai Nil secara adil antar negara riparian. Sehingga akan dijelaskan juga proses terbentuknya kerangka tersebut hingga akhirnya Ethiopia sebagai negara pertama yang meratifikasi kerangka tersebut.

A. Perjanjian Sungai Nil hingga Terbentuknya Nil Basin Initiative (NBI)

Lembah sungai Nil atau yang biasa disebut sebagai “buaian peradaban” merupakan sumber air yang memberi banyak manfaat bagi negara yang dialirinya. Dimana Sungai Nil memiliki potensi yang tinggi bagi negara di sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan air hingga meningkatkan perekonomian setiap negara tersebut. Tidak heran bahwa Sungai Nil dapat juga menjadi sumber konflik dalam perebutan pemanfaatan air tersebut. Terlebih lagi negara-negara yang di aliri oleh Sungai Nil sebagian besar merupakan negara dengan kondisi geografis yang kering dan terbelakang dalam segi ekonomi. Sehingga tanpa adanya pengaturan dalam pemanfaatan Sungai Nil, maka Sungai Nil akan memiliki potensi sumber konflik yang semakin tinggi. Dikarenakan tidak ada satu negara pun yang memiliki hak klaim atas

Sungai Nil tersebut. Semua negara yang di aliri oleh Sungai nil memiliki hak yang sama dalam penggunaan air Sungai Nil.

Perjanjian-perjanjian dalam penggunaan Sungai Nil sebenarnya sudah berkali-kali dibuat sejak masa kolonial Inggris di Afrika. Beberapa contohnya yaitu perjanjian pada tahun 1929. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian antara Inggris dengan Mesir. Pada saat itu, Mesir masih dibawah pengaruh Inggris. Perjanjian 1929 tersebut memberikan kekuatan veto pada Mesir serta mengamankan air Sungai Nil untuk Mesir. Inggris melakukan perjanjian tentang pemanfaatan Sungai Nil dengan Mesir dan memberikan hak veto pada Mesir atas air Sungai Nil, salah satunya dikarenakan pada era tersebut Inggris beranggapan bahwa Mesir memberikan peluang ekonomi yang tinggi bagi Inggris. Perjanjian tersebut pun dikenal dengan Perjanjian Angola-Mesir 1929. Isi dari perjanjian Angola-Mesir 1929, yaitu:

“Salient Features of the 1929 Treaty:

- 1. That Egypt and (Anglo-Egyptian) Sudan utilise 48 and 4 billion cubic meters (BCM) of the flow per year respectively, that is, 92.3 percent for Egypt and 7.7 percent (for Sudan) of the total utilisable flow. Precedence was given to the socalled ‘historic or acquired rights’*
- 2. That the flow of the Nile between January 20 to July 15 (the dry season (summer) be reserved for Egypt.*
- 3. That Egypt reserves the right to monitor the Nile flow in the upstream countries.*
- 4. That Egypt assumes the right to undertake Nile River related projects without consent of upper riparian states.*
- 5. That Egypt assumes the right to veto any construction projects that would affect her interests adversely (Lumumba, 2007, hal. 14)”*

Dimana inti dari isi perjanjian tersebut bahwasanya mengalokasikan 48 miliar meter kubik per tahun ke Mesir sebagai haknya dan 4 miliar meter kubik per tahun ke Sudan. Dimana Mesir mendapatkan hak dalam pemanfaatan air Sungai Nil lebih banyak sekitar 92,3% serta segala proyek yang akan dibangun disekitar sungai Nil haruslah atas ijin Mesir dan tidak mempengaruhi jumlah kubik air yang masuk pada Mesir. Namun perjanjian Angola-Mesir 1929 pun kembali di revisi antara Mesir dan Sudan pada tahun 1959.

Perjanjian 1959 dikenal dengan Perjanjian Bilateral Mesir-Sudan. Perjanjian tersebut tentu sangatlah menguntungkan bagi Mesir dan Sudan karena hanya dilakukan secara bilateral tanpa adanya campur tangan negara-negara lainnya yang juga dilewati oleh Sungai Nil. Tujuan sebenarnya Mesir atas dibuatnya Perjanjian 1959 bersama Sudan yaitu guna mendapatkan kontrol penuh atas Sungai Nil. Karena Mesir yang sedang membangun Bendungan Aswan merasa perlu mencari jaminan dari Sudan serta pengakuan Internasional atas pembiayaan dan teknologi bendungan tersebut. Mesir memilih membuat perjanjian dengan Sudan karena salah satu Bank Internasional yaitu *the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* mewajibkan adanya alokasi air yang aman untuk Sudan (Mekonnen K.).

Inti dari isi Perjanjian Bilateral Mesir-Sudan 1959 yaitu mengalokasikan air Sungai Nil sebanyak 55,5 m³ ke Mesir dan 18,5 m³ ke Sudan tanpa memberikan hak air kepada negara-negara riparian lainnya (Helmut Kloos, 2010, hal. 36), termasuk Ethiopia sebagai negara sebagian besar aliran Sungai Nil yang diterima Mesir berasal dari Ethiopia, yaitu Sungai Nil Biru. Perjanjian tersebut sebenarnya bukanlah perjanjian yang adil dalam pemanfaatan Sungai Nil. Dikarenakan terdapat 8 negara lainnya yang seharusnya memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan air Sungai Nil dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Berikut tabel alur Perjanjian Nil 1929 dan 1959.

Tabel 3.1 Alur Perjanjian Nil 1929 dan 1959 (Lumumba, 2007)

YEAR	MILESTONES (HISTORICAL HIGHLIGHTS)
1920	Nile Project Commission formed, offers allocation scheme for Nile riparians. Findings not acted upon. Century Storage Scheme put forward, emphasising upstream, relatively small-scale projects. Plan is criticised by Egypt.
1925	New water commission is named.
7 May 1929	Commission study leads to Nile Waters Agreement between Egypt and Britain, having serious implications for Sudan.
1952	Aswan High Dam proposed by Egypt. Promise of additional water necessitates new agreement.
Sept-Dec 1954	First round of negotiations between Egypt and Sudan which end inconclusively
1956	Sudan gains independence through a pro-Egypt led military coup. Egypt becomes more conciliatory with new Sudanese Government after the 1958 coup.
8 Nov.1959	Agreement for the Full Utilization of the Nile waters (Nile Waters Treaty) signed between Egypt and Sudan.

Dari tabel tersebut terlihat jelas bagaimana proses awal mula terbentuknya Perjanjian 1929 dan 1959 mulai dari proses usaha diplomatik Mesir terhadap Inggris hingga perjanjian yang berupa kerjasama antara Mesir dan Sudan. Perjanjian tersebut sampai saat ini masih menjadi acuan Mesir dan Sudan dalam pemanfaatan air Sungai Nil. Dimana Mesir mendapatkan hak lebih besar dalam jumlah kuota air Sungai Nil yang sebagian besar berasal dari Sungai Nil Biru.

Namun, perjanjian tersebut mendapat banyak protes dari negara riparian lainnya. Perjanjian tersebut dirasa tidak memberi keadilan bagi negara-negara riparian lainnya. Terlebih lagi ketersediaan air tahunan perkapita tahun 1990an diperkirakan akan semakin menurun selaras dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Diperkirakan akan turun dari 1.070 sampai 620 m³ di Mesir, dari 2.360 sampai 980 m³ di Ethiopia, dari 590 sampai 190 m³ di Kenya, dari 880 sampai 350 m³ di Rwanda, dan dari 2.780 sampai 900 m³ di Tanzania (Mwangi Kimenyi, 2015, hal. 72). Sehingga negara-negara riparian lainnya mulai sadar akan kebutuhan air yang semakin meningkat dengan jumlah air yang semakin menurun. Jika tidak dikelola dengan baik, maka kelangkaan air pun tidak dapat dihindari.

Maka dari itu, sejak tahun 1990an negara-negara riparian telah membicarakan langkah-langkah adil dalam pemanfaatan Sungai Nil agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya Perjanjian 1929 dan 1959 telah menimbulkan perselisihan dimana negara-negara riparian lainnya merasa bahwa perjanjian tersebut hanya menguntungkan Mesir dan Sudan. Serta perjanjian tersebut juga tidak melibatkan negara-negara riparian lainnya. Sehingga sangatlah tidak adil bagi mereka, terutama Ethiopia sebagai negara yang dekat dengan sumber air Sungai Nil Biru, namun tidak dapat memanfaatkan air Sungai Nil Biru semaksimal mungkin.

Sehingga pada tahun 1993, negara-negara riparian telah menyeleggarakan sebuah forum konsultatif guna membangun sebuah inisiatif multilateral untuk mengelola sumber air Sungai Nil. Tujuan utama yang ingin dicapai oleh negara-negara riparian ialah beralih dari warisan konflik hidropolitik ke salah satu kolaborasi dan kerja sama regional. Proses ini sangat didukung tidak hanya oleh negara-negara riparian sendiri tapi juga oleh masyarakat internasional. Sejumlah mitra pembangunan penting mendukung kegiatan kooperatif secara finansial, termasuk Canadian International Development

Agency (CIDA), UNDP, Bank Dunia (sejak 1997) (Nicol, 2016, hal. 552).

Forum konsultatif tersebut berada di bawah sebuah konferensi yaitu 'Nile-2002 Conference atau Konferensi Nil-2002'. Negara-negara riparian menyelenggarakan konvensi tersebut sebagai ruang ventilasi guna menjadi lembaga pemangku kepentingan dan akademisi untuk berbicara dan bertukar pandangan mengenai masalah hukum, sosio-ekonomi, politik, peraturan dan pengelolaan sumber daya air Sungai Nil. Diadakan sebuah konferensi tahunan sejak tahun 1993 hingga 2002 dibawah *the Technical Cooperation Committee for the Promotion of the Development and Environmental Protection of the Nile Basin* (TECCONILE). TECCONILE tersebut telah didirikan sejak tahun 1993 sebagai platform kelembagaan (Woldetsadik, 2017, hal. 198).

Dalam konferensi yang sering dilakukan tersebut, membahas tentang pengelolaan sumber daya air Sungai Nil secara koordinatif melalui sebuah kerangka hukum dan kelembagaan yang permanen serta beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam rencana pembuatan kesepakatan tersebut. Akhirnya pada Februari 1995, Nile-COM melakukan langkah pentingnya yang pertama, yaitu mengadopsi rencana *the Nile River Basin Action Plan*. Rencana tersebut pun didukung oleh Canada International Development Agency (CIDA). Nile-COM itu sendiri merupakan Badan pembuat keputusan dan politik tertinggi yang terdiri dari Menteri yang bertanggung jawab atas Urusan Air di Negara-negara Anggota.

Pada pertemuan keempat oleh Nile-COM pada Mei 1996, kembali menegaskan adanya komitmen dari negara-negara riparian. Hingga akhirnya dibentuklah *Panel of Experts* (PoE) guna membantu dalam rencana tersebut yang terdiri dari tiga anggota. Anggota tersebut terdiri dari negara riparian yang telah dipilih. Dan pada tahun 1997, Nile-COM bekerjasama dengan CIDA, United Nations Development Programme (UNDP) dan dibantu dengan *World Bank* semakin mempercepat realisasi kerangka yang telah direncanakan.

Setelah berproses panjang, pada tahun 1998 disetujui proposal rencana pembentukan *Nile Basin Initiative* (NBI). Pada Februari 1999, platform tersebut berkembang dan keseluruhan proses dimandatkan pada *Transitional Institutional Mechanism of the Nile Basin* yang baru. Dan akhirnya kesepakatan pertama yang benar-benar komprehensif didirikan secara resmi pada tanggal 22 Februari 1999 melalui *Agreed Minutes on NBI*. Kesepakatan tersebut ditandatangani di Dar Es Salaam, Tanzania.

Nile Basine Initiative (NBI) itu sendiri merupakan sebuah forum konsultasi dan koordinasi di antara Negara-negara Basin untuk pengelolaan dan pengembangan berkelanjutan air Sungai Nil Bersama dan sumber daya terkait untuk keuntungan *win-win* yang merupakan kemitraan antar pemerintah dari 10 negara Lembah Nil, yaitu Burundi, DR Kongo, Mesir, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Sudan Selatan, Sudan, Tanzania dan Uganda. Eritrea berpartisipasi sebagai pengamat. (Nil Basin Initiative). Sehingga dengan dibentuknya NBI tersebut, diharapkan dapat menjalin kemitraan yang adil antar negara-negara riparian sehingga dapat mengurangi potensi konflik dalam pemanfaatan air Sungai Nil sesuai dengan slogan NBI “*One River One People One Vision*” dan visi NBI “*To achieve sustainable socio-economic development through the equitable utilization of, and benefit from, the common Nile Basin water resource*”, yang intinya memanfaatkan sumber air Sungai Nil secara adil dan merata (Nil Basin Initiative).

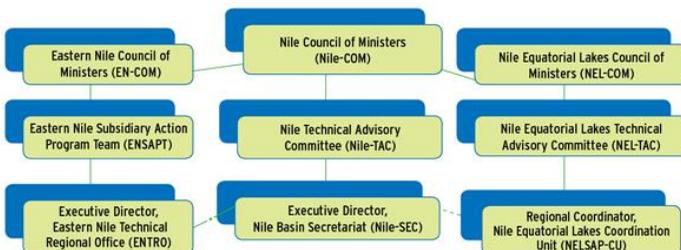
Dimana NBI sebagai mekanisme transisi inklusif untuk kerja sama sampai kerangka kerjasama permanen terbentuk. Dengan kata lain bahwa NBI merupakan wadah dalam proses pembentuka kerangka kerjasama dalam pengaturan pemanfaatan Sungai Nil yang permanen. Adapun tujuan dari NBI, yaitu:

1. Mengembangkan sumber air Sungai Nil dengan cara yang berkelanjutan dan setara untuk menjamin keamanan, keamanan, dan perdamaian bagi semua masyarakatnya.

2. Untuk memastikan pengelolaan air yang efisien dan penggunaan sumber daya yang optimal.
3. Untuk memastikan kerjasama dan aksi bersama antara negara-negara riparian, mencari keuntungan *win-win*.
4. Menargetkan pengentasan kemiskinan dan mendorong integrasi ekonomi.
5. Untuk memastikan bahwa program menghasilkan perpindahan dari perencanaan ke tindakan (Nil Basins Initiative).

Dalam NBI tersusun struktur kepemimpinan, yang terdiri dari badan keputusan dan pembuatan kebijakan NBI yang paling tinggi adalah *the Nile Council of Ministers* (Nile-COM) atau Dewan Menteri Nil, yang terdiri dari Menteri yang bertanggung jawab atas urusan air di setiap negara anggota NBI (*Ministers in charge of Water Affairs*). Dimana Dewan Menteri tersebut didukung oleh *the Nile Technical Advisory Committee* (Nile-TAC) atau Komite Penasihat Teknis Nil. Dimana *Nile-TAC* terdiri dari 20 pejabat pemerintah senior yang berasal dari dua yang terdiri dari 20 pejabat pemerintah senior, yang berasal dari masing-masing negara anggota dengan jumlah 2 perwakilan di setiap negaranya (Nil Basins Initiative).

Bagan 3.1 Struktu Kepemimpinan *Nile Basine Initiative* (NBI)



Sebenarnya NBI bukanlah usaha pertama yang dilakukan negara-negara riparian. Dimana beberapa negara bagian Sungai Nil tersebut telah menunjukkan ketertarikan mereka untuk bergerak menuju pendekatan yang lebih kooperatif guna menyelesaikan konflik Sungai Nil mengenai pembagian hak dalam pengelolaan Sungai Nil. Usaha tersebut telah ada sejak tahun 1980an dengan mengadakan sebuah konsultasi tidak resmi. Dari konsultasi tersebutlah akhirnya menghasilkan kerangka berupa Undugu dan *the Technical Cooperation Committee for the Promotion of the Development and Environmental Protection of the Nile Basin* (TECCONILE) (Mwangi Kimenyi, 2015, hal. 76).

Dan perlu ditegaskan kembali bahwasanya NBI dirancang bukanlah sebagai kerangka untuk solusi permanen dalam konflik Sungai Nil jangka panjang. NBI hanya sebagai kerangka sementara untuk mendorong pertukaran dialog, bantuan teknologi serta menciptakan pembangunan bersama (Mwangi Kimenyi, 2015, hal. 73).

B. Proses Pembentukan Nil Basin Cooperative Framework Agreement (CFA)

Cooperative Framework Agreement (CFA) merupakan sebuah kesepakatan yang akan digunakan secara permanen melalui NBI. Tujuan dibentuknya CFA merupakan salah satu usaha untuk menyusun instrumen hukum komprehensif yang menjamin akses yang adil dan penggunaan yang setara di seluruh wilayah sungai. Sehingga kerangka tersebut direncanakan akan menjadi kerangka permanen pertama yang dibentuk dalam pengelolaan Sungai Nil.

Sejak Januari 1997, draft *Panel of Experts* (PoE) telah ditugaskan untuk mengerjakan draft CFA. Dimana draft tersebut diserahkan pada Agustus 2000 pada pertemuan Nile-COM untuk disepakati. Selanjutnya dibentuk *Transitional Committee* atau Komite Transisi dibawah naungan NBI guna menyelesaikan usaha dari PoE tersebut. Akhirnya pada Agustus 2001, komite tersebut menghasilkan draft pertama CFA dengan

misi menawarkan solusi untuk isu-isu yang masih ada yang memerlukan konvergensi riparian dan untuk mengejar karya-karya mengenai struktur formal dokumen CFA.

Dilakukanlah negosiasi guna mencapai kesepakatan draft CFA tersebut yang dilaksanakan oleh Komite Negosiasi dengan membahas sebuah rancangan terlebih dahulu yang dibuat oleh Komite Transisi, dan menyelesaikan hampir semua masalah yang ada.. Proses negosiasi berlangsung sejak tahun 2003 hingga 2005 . Namun, pada bulan Maret 2005, pada pertemuan Nile-COM di Addis Ababa gagal mengambil keputusan mengenai teks akhir dokumen tersebut (Woldetsadik, 2017). Dimana adanya perbedaan pendapat sehingga menimbulkan perdebatan yang menjadikan draft CFA tersebut sulit untuk mendapat kespakatan oleh negara-negara riaparian lainnya. Dimana teks yang diperdebatkan dalam draft CFA tersebut yaitu pada pasal 14, khususnya pada pasal 14b. Pasal 14 dalam draft CFA berbunyi:

“Having due regard for the provision of Articles 4 and 5, Nile Basin states recognize the vital importance of water security to each of them. The States also recognize that cooperative management and development of the waters of the Nile River System will facilitate achievement of water security and other benefits. Nile Basin states therefore agree, in a spirit of cooperation:

(a) to work together to ensure that all States achieve and sustain water security

(b) not to significantly affect the water security of any other Nile Basin State (Mekonnen D. Z., 2010, hal. 428)”

Pada Pasal 14 menjelaskan mengenai keamanan air pada Sungai Nil. Serta lebih detailnya pada pasal 14b menjelaskan bahwa tidak ada efek yang signifikan yang mempengaruhi negara bagian Nil lainnya. Maksudnya yaitu segala bentuk proyek yang dibangun tidak akan mempengaruhi debit air di negara lainnya serta tidak adanya hal apapun yang dapat

mempengaruhi jumlah air yang diperoleh oleh setiap negara bagian Nil.

Mesir dan Sudan kemudian mengusulkan kata-kata alternatif di pasal 14 b yang menjadi “*Nile Basin States therefore agree, in a spirit of cooperation: . . . (b) not to significantly affect the water security and current uses and rights of any other Nile Basin State,*”. Dimana mereka lebih menekankan pada pasal 14b tersebut dengan kalimat “*current uses and rights*” (penggunaan dan hak-hak saat ini) yang berarti secara significant tidak mempengaruhi penggunaan dan hak-hak air yang telah berlaku sampai saat ini, yaitu penggunaan dan hak-hak air menurut perjanjian 1929 dan 1959 yang memberikan lebih banyak jumlah air kepada Mesir dan Sudan. Tentu saja usulan dari Mesir dan Sudan untuk menambahkan kalimat dalam pasal 14b mendapat penolakan dari negara-negara riparian lainnya. Mereka menganggap bahwa hal tersebut sama saja merealisasikan Perjanjian 1929 dan 1959 ke dalam CFA, sebuah kerangka kerja sama yang baru. Dimana CFA di bentuk dengan tujuan mendapatkan hak yang lebih adil dibanding dengan perjanjian lama tersebut.

Setelah menjalani proses panjang dan tidak mendapatkan titik temu dalam perdebatan tersebut, akhirnya pada pertemuan tanggal pada 22 Mei 2009, Nile-COM memutuskan untuk mengadopsi draft CFA dengan mengosongkan pasal 14b yang menjadi perdebatan. Yang selanjutnya pasal 14b tersebut akan diserahkan dan diselesaikan oleh *Nile River Basin Commission* (NRBC). Karena diyakini bahwa perdebatan pasal 14b tersebut akan menjadi perdebatan panjang yang dapat menghambat pembentukan CFA itu sendiri.

Setelah disetujui oleh Nil-COM, pada pertemuan tanggal 13 April 2010, 7 negara menyetujui untuk membuka kembali draft CFA dimana pasal 14b telah dikosongkan. Dan akhirnya

pada 14 Mei 2010, 4 negara menandatangani draft tersebut, yaitu Ethiopia, Rwanda, Tanzania, dan Uganda di Entebbe, Uganda. Diikuti oleh Kenya pada 18 Mei 2010 dan Burundi 28 Mei 2011. Mesir dan Sudan tetap menolak draft CFA tersebut. Setelah proses penandatanganan, pada April 2013, pemerintah Ethiopia melaporkan bahwa:

“The Council of Ministers has referred a draft proclamation on the Nile Basin Cooperative Framework Agreement to the House of People's Representatives (HPR) for ratification.”

Kemudian sebuah siaran pers yang dikirim dari Kantor Perdana Menteri menambahkan:

“The upper riparian countries that signed the Cooperative Framework Agreement are highly desirous for the Agreement to be ratified and implemented, the statement said (Berhane, 2013).”

Dimana dimaksudkan bahwa Pemerintah Ethiopia menunjuk *House of People's Representatives* (HPR) untuk membahas draft CFA lebih lanjut guna proses ratifikasi serta negara-negara yang telah menandatangani CFA, memiliki keinginan besar untuk meratifikasi dan mengimplementasikan CFA tersebut. Dimana Ethiopia haruslah menjadi teladan bagi negara-negara riparian lainnya dengan meratifikasi CFA. Draft proklamasi untuk meratifikasi CFA pun diajukan dalam waktu kurang dari 8 hari kerja yang biasanya memerlukan waktu berbulan-bulan. Dan tidak lama setelah itu, situs resmi Kementerian Luar Negeri Ethiopia melaporkan bahwa:

“The House of Peoples' Representatives on Thursday (April 18th) referred a Proclamation ratifying the Nile Basin Cooperation Framework Agreement to its Natural Resource and Environmental Protection Standing Committee for discussion and approval.”

Dimaksudkan bahwa HPR telah menunjuk *ratifying the Nile Basin Cooperation Framework Agreement to its Natural Resource and Environmental Protection Standing Committee*

untuk mendiskusikan draft tersebut dan disetujui. Yang berarti bahwa draft tersebut telah melewati beberapa tahap lebih cepat untuk segera diratifikasi. Setelah negosiasi telah diselesaikan oleh pemantauan dan kepemimpinan yang kuat dari Ethiopia, dan memastikan kepentingan nasional dan hak internasional Ethiopia, akhirnya pada 13 Juni 2013 Ethiopia sebagai negara pertama yang meratifikasi CFA. Dengan diratifikasinya CFA tersebut, secara otomatis Ethiopia terikat dengan pasal-pasal yang telah dimuat dalam draft tersebut. Keputusan Ethiopia pun diikuti oleh beberapa negara riparian lainnya, yaitu Rwanda meratifikasi CFA pada 28 Agustus 2013 dan Tanzania meratifikasi pada 26 Maret 2015.

Dapat dikatakan bahwa dengan dibentuknya CFA, secara tidak langsung dapat menghapus perjanjian lama dalam pemanfaatan Sungai Nil, yaitu Perjanjian 1929 an 1959 yang menimbulkan protes oleh negara-negara riparian lainnya, termasuk Ethiopia sebagai negara yang dekat dengan sumber air Nil Biru. Dimana CFA menguraikan prinsip, hak dan kewajiban dalam pengelolaan Sungai Nil secara adil dan memperhatikan hak masing-masing negara bagian Sungai Nil secara merata. CFA tersebut bermaksud untuk mempromosikan pengelolaan terpadu, pembangunan berkelanjutan, dan pemanfaatan sumber daya air DAS yang harmonis, serta konservasi dan perlindungan mereka untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan.

Sehingga untuk mempermudah terwujudnya tujuan CFA, dibentuk sebuah mekanisme kelembagaan permanen, yaitu *Nile River Basin Commission* (NRBC). NRBC tersebut berfungsi untuk memfasilitasi pelaksanaan CFA dan memfasilitasi setiap kerjasama yang dilaksanakan antara negara-negara riparian lainnya dalam membahas pengelolaan dan Pengembangan Sungai Nil (*Nil Basin Initiative*). Selain itu juga, NRBC juga akan mengawasi dan meneliti prosedur dalam setiap proyek yang akan dilakukan oleh setiap negara riparian guna memastikan bahwa proyek tersebut tidak membawa dampak yang signifikan terhadap negara-negara riparian lainnya.

Namun, jika seluruh negara-negara riparian telah sepakat untuk mengadopsi CFA, maka NBI sebagai kerangka transisi atau kerangka non permanen akan digantikan oleh sebuah komisi wilayah sungai yang permanen. Sehingga, negara-negara tersebut diharapkan dapat membangun norma kerjasama yang semakin baru melalui kegiatan bersama mereka di bawah Program Visi Bersama/*Shared Vision Programme* (SVP) (Nicol, 2016, hal. 553) .

Tabel 3.2 Evolusi Pembentukan *Cooperation Framework Agreement* (Nil Basin Initiative)

Dates	Stage	Brief Description
--------------	--------------	--------------------------

Jan 1997 – Mar 2000	Panel of Experts	Text, or working document of principles, rights and obligations, and institutions, prepared.
Aug 2000- Aug 2001	Transitional Committee	Text converted into draft Agreement.
Dec 2003 – Dec 2005	Negotiations Committee	Draft Agreement negotiated with full mandate. Numerous reservations ('brackets' – alternative texts representing different positions) remain.
Mar 2006 – Jun 2007	Ministerial Negotiations	Draft Agreement advanced, with all but one reservation removed (Article 14, Water Security). Final reservation referred to Heads of State.
August 2008	Nile-COM	Reengagement, re-opening of the file at the Ministerial level.
Kinshasa Meeting May 22, 2009	Nile-COM	7 member countries agree to annex Article 14b for later resolution by NRBC; reservation by Egypt; Sudan not present at time of decision, but subsequently expressed its reservation
Nairobi: July 3, 2009	Meeting of country negotiators	7 countries agree on a cleaned text; strong reservations by Egypt and Sudan
Alexandria Meeting July 27/28, 2009	Nile-COM	Joint decision to allow for more time to seek joint agreement
Entebbe, Sept 2009 Dar es Salaam, Dec 2009 Sharm el Sheikh, Apr 2010	Joint Nile-TAC and Negotiators Committee	Deliberations on options to move forward together

Sharm el Sheikh Meeting: April 13, 2010	Nile-COM	7 countries agree to open CFA (cleaned text) for signature; position rejected by Egypt and Sudan
May 14, 2010	CFA opened for signature	4 countries (Ethiopia, Rwanda, Tanzania, and Uganda) sign the opened CFA in Entebbe, Uganda
May 19, 2010		Kenya signs the CFA in Nairobi, Kenya
February 28, 2011		Burundi signs the CFA in Bujumbura, Burundi
June 13, 2013	Ratification	Ethiopia ratifies the CFA
August 28, 2013	Ratification	Rwanda ratifies the CFA
March 26, 2015	Ratification	Tanzania ratifies the CFA

